

ANALISA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Lia Ekowati, Cathryna R.B.S, Rodiana Listiawati
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, 16422
Email: liaekowati@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa kemampuan keuangan daerah kota Depok di wilayah Jawa Barat tahun 2005-2010. Kami menggunakan analisis otonomi fiskal daerah atau otonomi desentralisasi fiskal dengan alat ukur berupa Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Upaya Fiskal. Kota Depok memiliki Derajat Desentralisasi Fiskal yang kurang karena perbandingan PAD maupun BHPBP terhadap TPD sebesar 11.60% dan 15.51%, Kebutuhan Fiskalnya telah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya sebesar 93.59 kali. Kapasitas Fiskalnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan PAD dan Dana Bagi Hasil sebesar 0.0155 kali. Namun Upaya Fiskal termasuk kurang sebesar 0.72%. Jadi ketergantungan pemerintah daerah kota Depok terhadap pemerintah pusat masih tinggi dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah kota Depok yang berada di level kurang. Akan tetapi memiliki potensi untuk meningkatkan PAD dan Dana Bagi Hasil melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Kata kunci: Kemampuan, Keuangan, Desentralisasi, Fiskal, Otonomi

Abstract

This study aims to analyze the capability of local finance in the city of Depok West Java 2005-2010. We used analysis of local fiscal autonomy or decentralization of fiscal autonomy with measuring devices in the form of Degree of Fiscal Decentralization, Fiscal Need, Fiscal Capacity and Fiscal Effort. City of Depok has a less degree of Fiscal Decentralization for PAD and BHPBP comparison to TPD of 11.60% and a 15.51%, fiscal requirement has been able to meet the basic needs of its people by 93.59 times. Fiscal capacity has the ability to generate revenue and DBH of 0.0155 times. However Fiscal Efforts include no less than 0.72%. So the dependence of local governments on central government Depok city still seen high levels of fiscal capacity of Depok city in the level is less. But has the potential to increase revenue and DBH through intensification and extension of local revenue.

Key words: *Capability, Finance, Decentralization, Fiscal, Autonomy.*

PENDAHULUAN

Hingga dewasa ini kemampuan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin

sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah

sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Menurut E.Koswara (2000) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Hal senada juga diungkapkan oleh Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah maka perlu dilakukan suatu Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan daerah adalah Analisis otonomi fiskal daerah atau otonomi desentralisasi fiskal dengan alat ukur berupa Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Upaya Fiskal.

RUMUSAN MASALAH

Penerapan otonomi daerah menimbulkan dampak tegas terhadap tuntutan kemandirian bagi tiap-tiap daerah agar mampu mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dengan menetapkan arah prioritas pembangunan, terutama sumberdaya manusia dan pembiayaan yang sangat berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mardiasmo (2002;67) mengemukakan: Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah dipengaruhi oleh arah dan kebijakan fiskal dan moneter.

Namun untuk membangun kemandirian fiskal daerah selama ini masih banyak mengalami masalah yang disebabkan antara lain:

1. Rendahnya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom sehingga menimbulkan kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas keuangan daerah atau disebut *fiscal gap*.
2. Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan.
3. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi potensi daerahnya
4. Buruknya sistem manajemen keuangan daerah.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah: “Bagaimanakah Kemampuan Keuangan Daerah Kota Depok yang Berada di Wilayah Provinsi Jawa Barat?”

TINJAUAN PUSTAKA

Kemandirian keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian keuangan yang diukur dengan melihat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung kontribusi PAD terhadap total APBD, kontribusi subsidi dan bantuan pemerintah pusat atau pemerintah yang tinggi terhadap total

APBD, rasio pajak pusat untuk daerah terhadap total pendapatan daerah dan rasio pendapatan daerah terhadap total pendapatan negara. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten dengan menggunakan rasio antara PAD dengan penerimaan daerah (Suparmoko, 2002:42).

Bird dan Francois (2000: 167-169) menyatakan bahwa sistem fiskal yang sangat sentralistik merupakan penyebab mengapa kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tergantung kepada pusat. Hal ini mengakibatkan kecilnya porsi penerimaan sendiri dalam struktur penerimaan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat telah menyebabkan kurangnya insentif pencarian sumber-sumber untuk menutupi biaya daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1991: 35-36) mengemukakan bahwa untuk menentukan corak otonom daerah digunakan variabel-variabel pokok, yang terdiri dari kemampuan keuangan daerah, aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, ekonomi, demografi, organisasi masyarakat, variabel penunjang terdiri dari aspek politik dan hukum. Kriteria kemampuan/kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan berdasarkan penilaian kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kemampuan/ Kemandirian Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
00,10 - 10,00	Sangat Kurang
10,10 - 20,00	Kurang
20,10 - 30,00	Sedang
30,10 - 40,00	Cukup

40,10 - 50,10	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Fisipol, UGM, 1991.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 226 Tahun 2012 Pasal 1 yang dimaksud dengan Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing Propinsi sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penghitungan Derajat Desentralisasi Fiskal yang menggunakan data APBD Kota Depok Tahun 2005-2010 seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Menginformasikan bahwa perkembangan yang fluktuatif atas perbandingan PAD terhadap TPD, perbandingan BHPBP terhadap TPD dan perbandingan SUM terhadap TPD.

Tabel 2. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Depok Tahun Anggaran 2005-2010

Tahun	PAD /TPD	BHPBP /TPD	SUM/TPD
2005	17.60%	16.17%	66.23%
2006	11.60%	14.87%	73.52%
2007	9.86%	13.97%	76.16%
2008	10.20%	16.53%	73.27%
2009	9.08%	14.44%	76.49%
2010	11.23%	17.11%	71.67%
Rata-Rata	11.60%	15.51%	72.89%

Sumber: Data diolah

Rata-rata perbandingan PAD terhadap TPD sebesar 11.60% yang menurut kriteria kemampuan/kemandirian daerah yang dinyatakan oleh FISIPOL UGM 1991 berada di level kurang. Dan Rata-rata perbandingan BHPBP terhadap TPD sebesar 15.51% berada di level kurang. Sedangkan rata-rata perbandingan SUM terhadap TPD sebesar 72.89% berada di level sangat tinggi.

Data tersebut memperlihatkan bahwa kota Depok memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Atau memiliki kemampuan keuangan daerah yang masih rendah/kurang.

Tabel 3 menginformasikan kebutuhan fiskal kota Depok tahun 2005-2010 yang perkembangannya berfluktuatif. Rata-rata kebutuhan fiskal sebesar 93.59 kali. Level tertinggi pada tahun 2007 sebesar 116.49 kali dan level terendah tahun 2010 sebesar 74.39 kali.

Data tersebut menggambarkan bahwa Kota Depok memiliki kemampuan fiskal yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya

Tabel 3. Kebutuhan Fiskal Kota Depok Tahun Anggaran 2005-2010

Tahun	PPP (Rp)	SKF (Rp)	IPPP= PPP/SKF (X)
2005	345,654.26	3,976.43	86.93
2006	417,163.33	4,587.31	90.94
2007	614,696.43	5,276.62	116.49
2008	621,821.34	5,932.97	104.81
2009	654,811.01	7,443.48	87.97
2010	635,345.14	8,540.81	74.39
Rata-rata	548,248.58	5,959.60	93.59

Sumber: Data diolah

Tabel 4. menyajikan kemampuan kota Depok untuk menghasilkan PAD dan Dana Bagi Hasil selama tahun 2005-2010. Terlihat bahwa kapasitas fiskal kota Depok mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Rata-rata sebesar 0.0155 kali level tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 0.0177 kali dan level terendah di tahun 2006 sebesar 0.0147 kali.

Terlihat bahwa Kota Depok memiliki kapasitas fiskal yang baik untuk menghasilkan PAD dan Dana Bagi Hasil bila dibandingkan dengan Kapasitas Fiskal Standar seprovinsi Jawa Barat.

Tabel 4. Kapasitas Fiskal Kota Depok Tahun Anggaran 2005-2010

Tahun	PDRB (Rp)	KFs (Rp)	Kapasitas Fiskal= PDRB/KFs (X)
2005	5,489,399	374,663,302	0.0147
2006	6,435,121	446,749,782	0.0144
2007	7,502,376	487,883,802	0.0154
2008	8,765,897	549,119,405	0.0160
2009	11,014,081	621,454,739	0.0177
2010	10,303,475	689,294,181	0.0149
Rata-rata	8,251,725	528,194,202	0.0155

Sumber: Data diolah

Tabel 5. Menggambarkan upaya fiskal yang dimiliki kota Depok selama tahun 2004-2010. Data tahun 2004 digunakan pada penghitungan ini untuk menentukan perubahan PAD (Δ PAD) dan perubahan PDRB (Δ PDRB) dari tahun 2005 hingga 2010.

Rata-rata perubahan PAD sebesar 11.67 dan rata-rata perubahan PDRB sebesar 16.19, sehingga Elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar 0.72. Hal ini menunjukkan bahwa PAD kurang elastis terhadap PDRB atau setiap kenaikan PDRB sebesar 1% hanya mengakibatkan kenaikan PAD 0.72%.

Tabel 5. Upaya Fiskal Kota Depok Tahun Anggaran 2005-2010

Tahun	Perubahan PAD	Perubahan PDRB
2004	0	0
2005	55.88	18.25
2006	-23.27	18.91
2007	10.64	18.19
2008	11.58	18.33
2009	10.50	28.72
2010	16.33	10.95
Rata-rata	11.67	16.19

Sumber: Data diolah

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{11.67}{16.19} = 0.72$$

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Depok berada pada tingkat kurang dengan Derajat Desentralisasi Fiskal PAD/TPD sebesar 11.60%, BHPBP/TPD sebesar 15.51% dan SUM/TPD sebesar 72.89% serta upaya fiskal sebesar 0.72%. Namun memiliki kebutuhan fiskal yang baik sebesar 93.59 kali dan kapasitas fiskal yang cukup sebesar 0.0155 kali.

Adapun saran-saran yang kami rekomendasikan adalah:

1. Pemerintah daerah Kota Depok sangat perlu meningkatkan penerimaan sumber keuangan dengan meningkatkan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah dan mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menyokong PAD.
2. Meningkatkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota di wilayah Kota Depok agar tercipta kebijakan publik bersama yang menyeluruh dan menyentuh setiap lapisan masyarakat, terutama kebijakan dalam peningkatan PAD.
3. Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar kemampuan menggali, menganalisa, mengolah, mengevaluasi dan mengawasi potensi sumber-sumber keuangan daerah (PAD) terus meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya dan tercapainya tujuan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta yang telah memfasilitasi dan memberikan bantuan moral maupun material. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI dan FISIPOL-UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Halim. 2007, "Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah", UPP STIM YKPN, Depok

- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Depok
- Suparmoko, M., 2002, Ilmu Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, BP Fakultas Ekonomi UGM, Edisi Kelima, Depok.